

**ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DIBIDANG PENDIDIKAN  
YANG BERBASIS TEKNOLOGI**

**Sarrul Bariah<sup>1\*</sup>, Wiwik Angranti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kutai Kartanegara  
sarrulbariah@gmail.com<sup>1</sup>, wiwikangranti@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Pendidikan bagian terpenting untuk keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan arah kebijakan pemerintah dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan dan menjawab sejumlah tantangan dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan. Tipe peneltian ini menggunakan penelitian kualitatif guna menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan permasalahan antara kebijakan dan implementasi dari kebijakan tersebut. Gap yang terjadi kemudian di deskripsikan sehingga nampak jelas uraian pembahasan dari permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan adalah pemerintah telah bertekad untuk terus memecahkan berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan tersebut melalui berbagai upaya. Penyelesaian secara konvensional yang telah dilakukan selama ini masih belum mampu mengatasi permasalahan ada. Kebijakan pemerintah ini perlu dicermati dan diperhatikan oleh semua satuan Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengingat kebijakan ini adalah kebijakan strategis yang telah dianggap oleh para ahli sebagai kebijakan yang fleksibel dalam memaknai Pendidikan sehingga adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman dan teknologi sudah saatnya dapat diterapkan secara optimal. Dalam menjawab sejumlah tantangan dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan adalah dengan memetakan masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak utama perubahan. Untuk itu, penggerakan pemanfaatan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Pemanfaatan TIK kepada masyarakat dapat diterapkan di semua bidang kehidupan di antaranya bidang Pendidikan, sehingga diharapkan tidak adanya lagi gap lagi antara pembangunan kualitas pendidikan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, serta tidak adanya sekat-sekat interaksi membuat penerapan teknologi ini sangat urgen untuk di implementasikan secara masif dan terstruktur.

**Kata Kunci:** arah, kebijakan, pemerintah, teknologi, pendidikan

**PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah sektor yang sangat penting bagi suatu negara, bahkan indikator kemajuan suatu negara salahsatunya dilihat dari pengukuran tingkat pendidikannya. Tidak mengherankan jika banyak negara yang berlomba-lomba mempromosikan pendidikannya ke negara lain agar banyak pelajar-pelajar asing yang menimba ilmu di negara tersebut, apalagi ditengah arus globalisasi yang semakin maju seperti sekarang ini, tingkat keterserapan di dunia kerja maupun tingkat persaingan di berbagai sektor mendorong manusia untuk terus meng-*upgrade* dirinya agar kapasitasnya dapat mumpuni dan terserap di dunia kerja, khususnya dibidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan profesionalitas (bukan pekerja kasar).

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam sebuah kehidupan berbangsa. Pendidikan merupakan media strategis dalam memacu kualitas sumber daya manusia. Hal ini telah menjadikan pendidikan bagian terpenting untuk keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan suatu negara. Dengan melihat peran pendidikan yang sangat strategis ini, sudah menjadi keharusan bagi masyarakat pada khususnya dan negara pada umumnya untuk menjadikannya sebagai “agenda besar” negara agar keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan negara ini dapat terjamin. Jika kita melihat realita yang ada, terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan implementasi dari pendidikan itu sendiri. Posisi Indonesia menduduki peringkat 10 dari 14 negara berkembang di kawasan Asia Pasifik. Peringkat ini dilansir dari laporan monitoring global yang dikeluarkan lembaga PBB, Unesco. Penelitian terhadap kualitas pendidikan dasar ini dilakukan oleh Asian South Pacific Bureau of Adult Education (ASPBAE) dan Global Campaign for Education. Studi dilakukan di 14 negara pada bulan Maret-Juni 2005. Rangking pertama diduduki Thailand, kemudian disusul Malaysia, Sri Langka, Filipina, Cina, Vietnam, Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Nepal, Papua Nugini, Kep. Solomon, dan Pakistan. Indonesia mendapat nilai 42 dari 100 dan memiliki rata-rata E. Untuk aspek penyediaan pendidikan dasar lengkap, Indonesia mendapat nilai C dan menduduki peringkat ke 7. Pada aspek aksi negara, RI memperoleh huruf mutu F pada peringkat ke 11. Sedangkan aspek kualitas input/pengajar, RI diberi nilai E dan menduduki peringkat ke 14 (terakhir).<sup>1</sup>

Berdasarkan data hasil riset dari Ahmad Iswanto,<sup>2</sup> diperoleh gambaran bahwa Indonesia selalu membuat suatu perencanaan yang bertujuan untuk melakukan perkembangan yang ada di Negara Indonesia ini, terutama dalam kualitas pendidikan. Di berbagai Negara, sudah memulai terlebih dahulu dalam proses perencanaan kualitas dalam dunia pendidikan, dan Negara Indonesia termasuk Negara yang terlambat dalam proses perencanaan mengenai kualitas pendidikan. Berdasarkan definisi dari pendidikan, bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang digunakan untuk memperoleh sebuah pengetahuan dan keterampilan yang dimana, dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan bukan hanya ada di sekolahan saja, tetapi di lingkungan masyarakat bisa dikatakan sebagai sistem dari pendidikan itu sendiri. Berdasarkan data peringkat kualitas pendidikan yang termasuk dalam golongan Negara ASEAN, Negara Indonesia masuk kedalam peringkat 5 dari 10 negara ASEAN. Adapun keterangan dari berbagai informasi disetiap Negara yang tergolong pada Negara ASEAN yang sudah tercatat sekitar tahun 2013 antara lain sebagai berikut:

1. Di Negara Singapura memperoleh skor 0,768, dan pada tahun 2013 silam sudah tercatat hanya 1,3% murid sekolah yang gagal menuntaskan dalam dunia pendidikan.
2. Di Negara Brunei Darussalam memperoleh skor EDI sebesar 0,692 dan juga Brunei Darussalam menempati posisi ke - 30 di dunia. Tidak mengherankan, karena pemerintah Brunei menanggung semua biaya dalam dunia pendidikan, termasuk biaya ongkos penginapan, biaya makanan, dan biaya buku dan transportasi.
3. Di Negara Malaysia memperoleh skor 0,671 di Indeks Pendidikan UNDP.
4. Di Negara Thailand memperoleh skor EDI sebesar 0.608, dan dulu negara gajah putih sudah menempati posisi 89 di dunia, dengan anggaran pendidikan yang tertinggi, yakni 7,6% dari hasil Produk Domestik Brutto.

---

<sup>1</sup> Manda Sari, Perbandingan Pendidikan di ASEAN (Singapura), Artikel 14 Oktober 2016

<sup>2</sup> Ahmad Iswanto, Perbedaan Antara Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dengan Kualitas Pendidikan Di Berbagai Negara ASEAN, Koranmu Indonesia Edisi 7 Juni 2020

5. Di Negara Indonesia memperoleh skor 0,603, dan dulu Indonesia berada di posisi 108 di dunia serta hanya sebanyak 44% penduduk Indonesia yang menuntaskan pendidikan menengah. Sementara 11% murid yang gagal dalam menuntaskan pendidikan atau keluar dari sekolah.
6. Di Negara Filipina memperoleh skor 0,610, dan Filipina dulu menempati posisi 117 di dunia serta tingkat kegagalan murid dalam menuntaskan sekolah di Filipina termasuk yang tertinggi di dunia, yakni 24,2%. Namun begitu sebanyak 64% penduduk setidaknya telah menuntaskan pendidikan menengahnya.
7. Di Negara Vietnam memperoleh skor EDI 0,513 dan tingkat literasi penduduk dewasa sebesar 93,5%, serta dulu Vietnam yang berada di posisi 121 memiliki kualitas pendidikan yang lebih rendah ketimbang Irak dan Suriah.
8. Di Negara Kamboja memperoleh skor 0,495, Meski banyak yang mencatat perbaikan dalam satu dekade terakhir, Kamboja tetap bertengger di peringkat 136 di dunia
9. Di Negara Laos memperoleh tingkat literasi penduduk dewasa yang tergolong paling rendah, yakni 72,7%.
10. Di Negara Myanmar memperoleh skor EDI 0.371, dan dulu Myanmar berada di urutan 150 di dunia serta sudah tercatat hanya 19% penduduk Myanmar yang pernah mengesap pendidikan tingkat menengah.

Melihat kenyataan pahit tersebut, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai berbenah. Banyak kebijakan yang dianggap *out of the box* diambil dan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perangkat-perangkat di bawahnya, salahsatunya adalah kebijakan mengenai penggunaan dan pengembangan teknologi di bidang pendidikan.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2005 – 2025, yaitu terwujudnya Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Di dalam visi tersebut terkandung maksud dan tujuan bahwa dalam penyelenggaraan program dan kegiatan semua unit di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan untuk mencapai visi tersebut. Tidak terkecuali program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mencapainya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005—2025 telah disepakati melalui penahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan.<sup>3</sup> Hal ini merupakan turunan dari Amanat dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>4</sup> yang mengatur bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman.<sup>5</sup> Oleh karena itu, perancangan dan perkembangan pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin (*utilizing learning resources*), peserta didik belajar karena

---

<sup>3</sup> Ratnawati Susanto, Modul 2, Kebijakan Pemerintah dalam ICT dan Pendidikan, Universitas Esa Unggul, 2019, hlm. 2

<sup>4</sup> Nurdyansyah dan Luly Riananda, Developing ICT-Based Learning Model to Improve Learning Outcomes IPA of SD Fish Market in Sidoarjo, Proceedings of International Research Clinic & Scientific Publications of Educational Technology dalam Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 929

<sup>5</sup> Wiwik Angranti, Educational Management Based on Community Needs: A New Paradigm of Education Management in Indonesia, Journal of Education and Practice, Vol. 9, No. 14, 2018, hlm. 91

berinteraksi dengan berbagai sumber belajar secara maksimal dan bervariasi.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan penjelasan undang-undang bahwa pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Permasalahan yang akan didiskusikan dalam makalah ini adalah bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam implementasi teknologi di bidang Pendidikan? dan bagaimanakah menjawab sejumlah tantangan dalam implementasi teknologi di bidang Pendidikan?

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif<sup>7</sup> guna menyelidiki, menemukan, menggambarkan,<sup>8</sup> dan menjelaskan permasalahan antara kebijakan dan implementasi dari kebijakan tersebut. *Gap* yang terjadi kemudian di deskripsikan sehingga nampak jelas uraian pembahasan dari permasalahan yang telah dirumuskan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pemerintah dalam Implementasi Teknologi di Bidang Pendidikan

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.<sup>9</sup> Amanat ini kemudian dijalankan oleh Pustekkom Kemendikbud untuk ikut serta dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi baik untuk peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Pada saat ini pendidikan nasional masih dihadapkan pada 4 (empat) isu pokok permasalahan pendidikan dan kebudayaan yang perlu ditangani secara serius, yaitu:<sup>10</sup>

1. belum meratanya kesempatan atau akses memperoleh layanan pendidikan;
2. rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan;
3. belum optimalnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional; dan
4. lemahnya tata kelola pendidikan baik berupa belum efisiennya penggunaan sumber daya, kurangnya transparansi maupun kurangnya akuntabel pengelolaan pendidikan

Hakikat belajar yaitu proses interaksi dari seluruh kondisi disekitar peserta didik. Belajar diartikan suatu proses pengarahan untuk pencapaian tujuan dan proses melakukan

---

<sup>6</sup> Muhammad Japar, dkk, Media dan Teknologi Pembelajaran PPKN, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), hlm 52

<sup>7</sup> Safrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, Metode Penelitian Sosial, (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), hlm. 35

<sup>8</sup> Abdul Rahman, dkk., Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 231

<sup>9</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>10</sup> Ratnawati Susanto (2019), *Loc.Cit.*, hlm. 3

perbuatan melalui pengalaman yang diciptakan.<sup>11</sup> Oleh karenanya, pemerintah telah bertekad untuk terus memecahkan berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan tersebut melalui berbagai upaya. Penyelesaian secara konvensional yang telah dilakukan selama ini masih belum mampu mengatasi permasalahan ada. Untuk itu, diperlukan usaha yang sinergis dengan memadukan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan sumber-sumber daya pendidikan. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, maka peranan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi sangat penting. Untuk itu, setiap warga negara diharapkan mampu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, produktivitas, serta daya saingnya. Mengingat di era global seperti sekarang ini, transformasi berjalan dengan sangat cepat yang mengantarkan pola pikir dan pola hidup masyarakat semakin berubah. Perubahan pada masyarakat itu disebabkan karena peranan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dominan.<sup>12</sup> Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah mengingat eranya saat ini adalah era digital dimana tidak ada sekat-sekat lagi yang menghalangi interaksi antar manusia (guru-murid, dosen-mahasiswa) sehingga pemerataan pendidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas harus segera terwujud.

Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan beberapa regulasi yang kesemuanya mengisyaratkan dibutuhkan sentuhan teknologi dan kurikulum merdeka, seperti:

1. Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Mendikbudristek No. 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran
4. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 008/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka
5. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BSKAP Nomor 008/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka
6. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka
7. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka
8. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 034/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023

Sehubungan dengan hal itu, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) sebagai unsur tugas Kementerian di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melakukan berbagai kajian kebijakan dalam:<sup>13</sup>

1. pendayagunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembelajaran dan administrasi;

---

<sup>11</sup> Nurdyansyah. N. dan Eni Fariyarul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016), hlm. 1

<sup>12</sup> Ratnawati Susanto (2019), *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

2. pengembangan dan penyediaan infrastruktur TIK baik untuk satuan pendidikan dan satuan kerja pendidikan, pengembangan pusat sumber belajar (*learning resources center*) berbasis TIK;
3. mengembangkan bahan belajar (konten) berbasis TIK;
4. pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh berbasis TIK; dan
5. fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pendidikan, yaitu pembelajaran dan administrasi.

Kajian kebijakan ini sebagai upaya untuk mendukung pemecahan 4 isu pokok permasalahan pendidikan dan kebudayaan terutama yang berkaitan dengan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta meningkatkan tata kelola pendidikan.<sup>14</sup> Kebijakan pemerintah ini perlu dicermati dan diperhatikan oleh semua satuan Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengingat kebijakan ini adalah kebijakan strategis yang telah dianggap oleh para ahli sebagai kebijakan yang fleksibel dalam memaknai Pendidikan sehingga adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman dan teknologi sudah saatnya dapat diterapkan secara optimal.

### **Menjawab Tantangan dalam Implementasi Teknologi di Bidang Pendidikan**

Binti Maunah<sup>15</sup> dalam tulisannya mengungkapkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam wujud komputer, internet, TV, TV digital, hand phone, ponsel pintar (judged), dan wujud TIK lainnya berkembang begitu cepat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. TIK memiliki banyak sekali peranan dalam berbagai bidang termasuk di bidang pendidikan. Perkembangan peranan TIK dalam pendidikan membuat internet tidak hanya sebagai alat informasi tetapi juga sebagai sumber pengetahuan, media berkolaborasi, sumber belajar. Sebagai sumber belajar, internet makin interaktif, makin masif, dan makin menyatu dengan keseharian kehidupan siswa. Inilah tren TIK di sekolah pada era global saat ini.<sup>16</sup> Manfaat lain dengan kehadiran TIK yaitu sebagai alat untuk mendukung aktivitas pembelajaran dan sebagai alat untuk memperoleh sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. TIK di bidang pendidikan menyebabkan terjadinya pergerakan informasi di bidang pendidikan tanpa batas yang dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini menyebabkan perubahan mendasar dan penyesuaian dalam hal cara belajar siswa khususnya pada siswa sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/K). TIK juga telah menyebabkan perubahan peran siswa yang tidak sekedar menerima informasi tetapi bagaimana informasi itu diolah oleh siswa dan guru sehingga kebutuhan sumber belajar terpenuhi.<sup>17</sup> Teknologi informasi dan komunikasi dibidang pendidikan memang bagaikan 2 sisi mata uang, disatu sisi terdapat aspek negatif yang menghantui, namun disisi lain juga manfaat dalam penerapan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dibidang Pendidikan tidak kalah banyaknya, bahkan dapat dikatakan saat ini adalah sebagai suatu keharusan.

Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak utama perubahan. Untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Binti Maunah, Dampak Regulasi di Bidang TIK Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan, Cakrawala Pendidikan, Juni 2016, Th. XXXV, No. 2, hlm. 173

<sup>16</sup> Ramli, K., Sarwoto, dan Rusadi, 2010. Komunikasi dan Informatika Indonesia Whitepaer 2010, Jakarta: Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika, hlm. 20; lihat juga Binti Maunah, *Ibid.*

<sup>17</sup> Boyd, D.M., & Ellison, N.B. 2007. "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship." *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13 (1), article 11, <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html>, hlm. 1 dan 2; lihat juga Binti Maunah, *Ibid.*

itu, pergerakan pemanfaatan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Pemanfaatan TIK kepada masyarakat dapat diterapkan di semua bidang kehidupan di antaranya bidang pendidikan. Mengingat peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan perlu terus diberdayakan secara optimal, sehingga lulusannya mampu bersaing di tatanan global. Untuk menciptakan mutu lulusan yang diharapkan, perlu mencari terobosan-terobosan yang efektif dan efisien. Salah satu terobosan yang dimungkinkan dapat diterapkan, antara lain memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat selama ini untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan dan atau pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikemas dengan prinsip-prinsip teknologi pembelajaran akan mampu meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan serta peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan.<sup>18</sup> Tidak ada gap lagi antara pembangunan kualitas pendidikan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, serta tidak adanya sekat-sekat interaksi membuat penerapan teknologi ini sangat urgen untuk di implementasikan secara masif dan terstruktur.

Banyak informasi yang dapat diperoleh siswa dari situs-situs yang ada di internet. Segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif, dapat dengan mudah diakses oleh siswa. Hal ini akan mengubah pola hidup, pola pemikiran, pola perilaku siswa.<sup>19</sup> Dengan kata lain, kedekatan siswa dengan teknologi akan mempengaruhi perilaku sosial siswa.<sup>20</sup> Perubahan perilaku yang begitu besar pada kehidupan siswa dengan segala latar belakangnya juga memberikan dampak positif dan negatif yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di sekolah tempat siswa menuntut ilmu. Banyak nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari penggunaan TIK, tetapi tidak sedikit pula nilai-nilai negatif yang menyertainya.<sup>21</sup> Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tiga fungsi utama yang dipakai pada aktivitas pembelajaran, di antaranya yaitu:<sup>22</sup>

1. Teknologi informasi sebagai alat, TIK dipakai sebagai alat bantu bagi pengajar atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengelola kata, mengelola angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru dan staf, data kepegawaian, keuangan dan sebagainya.
2. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan (*science*). Teknologi menjadi bagian dari disiplin ilmu yang wajib dikuasai oleh siswa. Contohnya TIK menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta.
3. Teknologi informasi menjadi bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran. Teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Dalam hal

---

<sup>18</sup> Ratnawati Susanto (2019), *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> Luhur, Wicaksono, Pengaruh Kedekatan Siswa dengan Teknologi terhadap Prestasi Belajar. Skripsi. Bandar Lampung: FKIP, 2011, hlm. 1; lihat juga Binti Maunah, *Ibid.*

<sup>20</sup> Anggraini, Endah, Pengaruh Teknologi Informasi, Teman Sebaya, dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa SMA Negeri 6 Malang. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, 2015, hlm. 45; lihat juga Binti Maunah, *Ibid.*

<sup>21</sup> Busro, M., Nilai-nilai yang Bisa Dipetik dari Pemanfaatan TIK di Kampus. Makalah. Serang: STIE Banten, 2015, hlm. 1; lihat juga Binti Maunah, *Ibid.*

<sup>22</sup> Farid Ahmadi, Guru SD di Era Digital (Pendekatan, Media, Inovasi), (Semarang: Pilar Nusantara, 2017), hlm 8-9

ini posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai : fasilitator, transmitter, motivator, dan evaluator.

4. TIK juga berfungsi memperkecil kesenjangan penguasaan teknologi mutakhir, khususnya pada dunia pendidikan. Pelaksanaan pendidikan berbasis TIK paling tidak menaruh dua keuntungan. Pertama, sebagai motivasi bagi pelaksana pendidikan (termasuk guru) untuk lebih apresiatif dan berinovatif. Kedua, memberikan kesempatan luas pada pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada untuk memperoleh sumber informasi yang tidak terbatas.

Pada saat ini sekolah negeri maupun sekolah swasta mulai berusaha untuk mengatur ulang sistem pendidikan mereka. Banyak program sekolah yang ditawarkan pada masyarakat baik itu jurusan maupun status sekolah yaitu SSN, unggul, model, internasional, akselerasi dan sarana prasarannya. Yang jelas perubahan sekolah untuk menghadapi dunia global harus disiapkan dari unsur SDM yang berkualitas sehingga mampu berfikir menciptakan desain pendidikan, punya kiat manajemen yang baik dan tidak gagap terhadap pendidikan.<sup>23</sup> Jadi bisa dikatakan bahwa antara inovasi pendidikan dengan teknologi pendidikan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Inovasi adalah objek dan teknologi pendidikan adalah subyeknya. Keberadaan teknologi harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari masalah, karena teknologi lahir dan dikembangkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Berkaitan dengan hal itu, maka teknologi pendidikan juga dipandang sebagai suatu produk dan proses. Dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan tidak hanya merupakan sebuah ilmu akan tetapi juga sebagai sumber informasi dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran,<sup>24</sup> sehingga untuk mencapai kompetensi perlu ada pengukuran/penilaian. Penilaian hasil belajar memerlukan sebuah pengolahan dan analisis yang akurat,<sup>25</sup> karena dengan adanya instrumen penilaian tersebut, maka kompetensi siswa dalam menerapkan teknologi di bidang Pendidikan dapat tepat sasaran dan terlihat prosesitasnya.

## KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan adalah pemerintah telah bertekad untuk terus memecahkan berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan tersebut melalui berbagai upaya. Penyelesaian secara konvensional yang telah dilakukan selama ini masih belum mampu mengatasi permasalahan ada. Untuk itu, diperlukan usaha yang sinergis dengan memadukan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan sumber-sumber daya pendidikan. Sehubungan dengan hal itu, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) sebagai unsur tugas Kementerian di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melakukan berbagai kajian kebijakan terkait. Kebijakan pemerintah ini perlu dicermati dan diperhatikan oleh semua satuan Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengingat kebijakan ini adalah kebijakan strategis yang telah dianggap oleh para ahli sebagai kebijakan yang fleksibel dalam memaknai Pendidikan

---

<sup>23</sup> Unik Hanifah Salsabila dan Niar Agustian, Peran Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran, *Islamika : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Volume 3, Nomor 1, Januari 2021, hlm. 130

<sup>24</sup> Rogantina Meri Andri, Peran dan Fungsi Teknologi Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran, *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm 128-127

<sup>25</sup> Nurdyansyah. N., Andiek Widodo, *Manajemen Sekolah Berbasis ICT*. (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2015), hlm. 103

sehingga adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman dan teknologi sudah saatnya dapat diterapkan secara optimal.

Dalam menjawab sejumlah tantangan dalam implementasi teknologi di bidang Pendidikan adalah dengan memetakan masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak utama perubahan. Untuk itu, pergerakan pemanfaatan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Pemanfaatan TIK kepada masyarakat dapat diterapkan di semua bidang kehidupan di antaranya bidang Pendidikan, sehingga diharapkan tidak adanya lagi gap lagi antara pembangunan kualitas pendidikan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, serta tidak adanya sekat-sekat interaksi membuat penerapan teknologi ini sangat urgen untuk di implementasikan secara masif dan terstruktur.

## REFERENSI

- Abdul Rahman, dkk., *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Ahmad Iswanto, *Perbedaan Antara Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dengan Kualitas Pendidikan Di Berbagai Negara ASEAN*, Koranmu Indonesia Edisi 7 Juni 2020
- Anggraini, Endah, *Pengaruh Teknologi Informasi, Teman Sebaya, dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa SMA Negeri 6 Malang*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, 2015.
- Binti Maunah, *Dampak Regulasi di Bidang TIK Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan*, *Cakrawala Pendidikan*, Juni 2016, Th. XXXV, No. 2.
- Boyd, D.M., & Ellison, N.B. 2007. "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship." *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13 (1), article 11, <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html>.
- Busro, M., *Nilai-nilai yang Bisa Dipetik dari Pemanfaatan TIK di Kampus*. Makalah. Serang: STIE Banten, 2015.
- Farid Ahmadi, *Guru SD di Era Digital (Pendekatan, Media, Inovasi)*, Semarang: Pilar Nusantara, 2017.
- Luhur, Wicaksono, *Pengaruh Kedekatan Siswa dengan Teknologi terhadap Prestasi Belajar*. Skripsi. Bandar Lampung: FKIP, 2011.
- Manda Sari, *Perbandingan Pendidikan di ASEAN (Singapura)*, Artikel 14 Oktober 2016
- Muhammad Japar, dkk, *Media dan Teknologi Pembelajaran PPKN*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019.
- Nurdyansyah. N., Andiek Widodo, *Manajemen Sekolah Berbasis ICT*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2015.
- Nurdyansyah dan Luly Riananda, *Developing ICT-Based Learning Model to Improve Learning Outcomes IPA of SD Fish Market in Sidoarjo*, *Proceedings of International Research Clinic & Scientific Publications of Educational Technology dalam Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Nurdyansyah. N. dan Eni Fariyarul Fahyuni, *Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016.
- Ramli, K., Sarwoto, dan Rusadi, 2010. *Komunikasi dan Informatika Indonesia Whitepaper 2010*, Jakarta: Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Ratnawati Susanto, *Modul 2, Kebijakan Pemerintah dalam ICT dan Pendidikan*, Universitas Esa Unggul, 2019.
- Rogantina Meri Andri, *Peran dan Fungsi Teknologi Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran*, *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Safrihsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial*, Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Unik Hanifah Salsabila dan Niar Agustian, Peran Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran,  
Islamika : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Volume 3, Nomor 1, Januari 2021.

Wiwik Angranti, Educational Management Based on Community Needs: A New Paradigm of  
Education Management in Indonesia, Journal of Education and Practice, Vol. 9, No. 14,  
2018.